



Implementasi Sistem Informasi Untuk Penunjang Pengambilan Keputusan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Desa

Novia Lestari^a, Reti Handayani^b, Yulia Jihan SY^c

^aManajemen Informatika, AMIK Bukittinggi, novia_lestarii@rocketmail.com

^bManajemen Informatika, AMIK Bukittinggi, jeranikasdun@gmail.com

^cManajemen Informatika, AMIK Bukittinggi, yuliasyahila02012015@gmail.com

Abstract

Social Welfare is a condition that must be realized for all citizens in the fulfillment of material, spiritual, and social needs in order to live properly and able to develop themselves, so as to carry out its social functions. But in reality, many citizens have not been able to meet their basic needs because of their social constraints, resulting in difficulties in accessing social services and not being able to enjoy a decent life for humanity. In addition, the implementation of Social Welfare also experienced problems as a result of the lack of optimal human resources support, community roles, and funding support. To overcome these problems, it is necessary to have directed, integrated, and sustainable efforts by the Government, local government and society in the form of social services, so it is expected to accelerate the creation of Social Welfare for all communities. Verification and validation of poverty data is very important in the organization of social welfare to prevent the occurrence of invalid data or not up date, causing the same problems appear repeatedly, such as inaccuracy of program targets and poverty reduction activities, and poverty reduction targets difficult to achieve. The existence of this research is expected to be useful for the research object that is the village device in recording and processing the data of the population, so that does not happen Participant double data, incomplete identity data such as place and date of birth, NIK, and others, as well as changes in data caused by displacement or an unmonitored death. In addition it helps relevant stakeholders in determining the eligibility of beneficiaries to be equitable, on target and in accordance with existing provisions.

Keywords: Information System, Decision Support, Aid Distribution

Abstrak

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat. Verifikasi dan validasi data kemiskinan merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial guna mencegah terjadinya data tidak valid atau tidak up date, menimbulkan masalah yang sama muncul berulang-ulang, seperti ketidaktepatan sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan target penurunan kemiskinan sulit dicapai. Dengan adanya penelitian ini, dibangun sebuah system informasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi objek penelitian yaitu perangkat desa dalam merekap serta mengolah data penduduk, sehingga tidak terjadi Peserta data ganda, data identitas yang tidak lengkap seperti tempat dan tanggal lahir, NIK, dan lainnya, serta perubahan data yang diakibatkan perpindahan atau meninggal dunia yang tidak terpantau. Selain itu membantu *stakeholder* terkait dalam penentuan kelayakan penerima bantuan agar merata, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kata Kunci :Sistem Informasi, Pengambilan Keputusan, Pemberian Bantuan

© 2017 Prosiding SISFOTEK

1. Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar (UUD) '45, pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun sebagai negara berkembang, Indonesia tak luput dari dampak krisis ekonomi global yang mengakibatkan semakin tingginya harga kebutuhan pokok, sehingga kemampuan penduduk Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan semakin berkurang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah banyak melaksanakan program-program bantuan kepada masyarakat miskin dan masyarakat ekonomi lemah. Bahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdapat pos belanja bantuan sosial. Hal ini sangat wajar karena tercantum dalam RPJMN 2010-2014, yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah. Hal ini dilaksanakan salah satunya melalui jalur bantuan Pemerintah.

Belanja Bantuan Sosial didefinisikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat (Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga). Permasalahan yang sering timbul dalam penyaluran bantuan sosial ini adalah seringnya terdapat salah sasaran dalam penyaluran bantuan, dimana masyarakat yang seharusnya dinilai berhak untuk mendapat bantuan, tidak tersentuh pendataan, dan sebaliknya masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan justru sering mendapat jatah bantuan. Hal ini disebabkan karena tidak validnya data penduduk dan data penerima bantuan, data yang tidak akurat dan tidak *up to date*, sehingga data-data yang ada tumpang tindih. Selain itu juga karena belum terorganisirnya data penduduk yang tergolong masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu.

Dengan kemajuan teknologi komputer, agar data-data penduduk dan data penerima bantuan tersebut dapat terorganisir dengan baik, diperlukan sistem yang dapat menampung semua data dan mengorganisir data tersebut sesuai dengan kebutuhan. Sehingga data yang telah diinputkan tersebut valid, *up date* secara periodik dan tidak terjadi *redundancy* data, agar pelaporan dan pengambilan keputusan untuk penyaluran bantuan tepat sasaran. Selain itu, dengan sistem tersebut dapat ditentukan kriteria keluarga miskin sesuai dengan aturan dan kriteria yang ada, guna mencegah kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Maka, sistem informasi yang dibangun akan digunakan

untuk menginputkan data seluruh penduduk, sedangkan untuk menentukan penerima bantuan, diterapkan sistem pendukung keputusan seleksi pemberian bantuan pada masyarakat kurang mampu menggunakan metode *Analytical Hierarchy Proses* (AHP). AHP merupakan salah satu model untuk pengambilan keputusan yang komprehensif dengan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Selain itu dari sistem pendukung keputusan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) mampu menghasilkan hasil yang lebih konsisten serta sistem ini mudah dipahami dan mudah untuk diaplikasikan, dengan tujuan untuk mempermudah menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, serta mempermudah membuat laporan penerima bantuan.

2. Tinjauan Pustaka/Penelitian Sebelumnya

2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi

Salah satu bagian yang terpenting bagi perusahaan adalah penyimpanan. Pencatatan data yang secara manual sehingga dapat mempengaruhi munculnya kesalahan. Oleh karena itu, dibutuhkan perancangan suatu sistem informasi item data sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencari data tidak panjang dan menyederhanakan aliran sistem informasi [1].

Sistem Informasi merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi. Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Bila kurang mendapatkan informasi, dalam waktu tertentu perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan strategis sangat terganggu, yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaingnya [2].

2.2 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau *decision support system* (DSS) didefinisikan sebagai suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur (*semi structured*) supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. Pendapat lain menyatakan, Sistem Penunjang Keputusan (SPK) adalah salah satu cara mengorganisir informasi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam membuat keputusan [3].

Tahap - tahap Pembentukan Sistem Penunjang Keputusan :

1. Studi kelayakan

Sebelum membuat SPK perluditeliti trelebih dahulu kelyakannya, mengingat faktor biaya baik waktu, tenaga, maupun financial.

2. Persetujuan terhadap proposal kelayakan

Proposal kelayakan harus dapat menjelaskan kebutuhan dan urgensi dari keberadaan system tsb. Keuntungan dan biaya dari pembentukan SPK, waktu yg dibutuhkan, ketersediaan ahli atau pakar yg merupakan sumber pengetahuan SPK, serta ketersediaan perangkat hardware dan software baik yg utama maupun pendukungnya

3. Pemilihan hardware dan software

4. Merepresentasikan pengetahuan yang diperoleh dari para ahli dan pakar ke dalam computer

5. Mengimplementasikan pengetahuan dalam bentuk bahasa yg dipahami oleh komputer, menggunakan suatu bahasa pemrograman

6. Menguji sistem yg telah dibuat

2.3 Analytical Hierarchy Process (AHP)

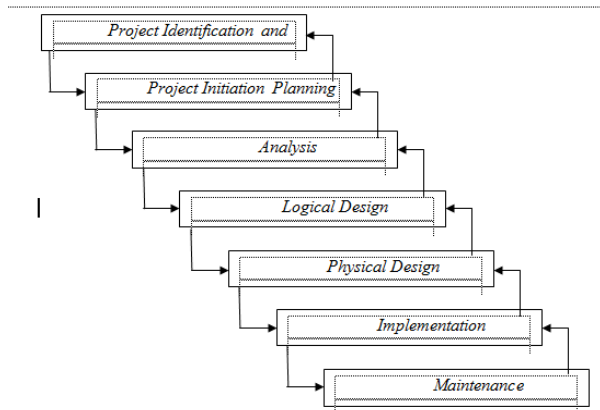
AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L.Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang di ikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya kebawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian di atur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis.

Pada dasarnya AHP merupakan suatu metode untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam suatu kelompok-kelompoknya, mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hirarki, memasukan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif yang akhirnya dengan dapat ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi [4].

3. Metodologi Penelitian

3.1 Model Pengembangan System

Model pengembangan sistem yang digunakan yaitu Sistem Development Life Cycle (SDLC) yang terdiri dari 7 subsiklus, seperti pada gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Diagram SDLC

Output atau produk yang dihasilkan ditiap phase SDLC

- a. *Project Identification & Selection*, menghasilkan : Perencanaan Sistem, yaitu menentukan prioritas sistem dan proyek, arsitektur dari data, jaringan, hardware, dan manajemen dari sistem informasi. Pada tahap ini akan dilakukan indentifikasi terhadap permasalahan yang ada sehubungan dengan tujuan pembangunan Sistem Informasi untuk penunjang pengambilan keputusan pemberian bantuan kepada masyarakat desa . Untuk kegiatan ini diperlukan waktu 1 bulan.
- b. *Project Initiation & Planning*, menghasilkan : Langkah terperinci atau rencana kerja untuk proyek,spesifikasi dari ruang lingkup penelitian dan syarat/bentuk sistem (*high-level*), tugas untuk anggota team dan sumber daya lainnya, sistem perundangan /pertimbangan. Dalam tahap ini dilakukan akan ditentukan ruang lingkup dan batasan penelitian, perencanaan sistem serta rencana pengalokasian sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan penelitian ini. Kegiatan ini akan memakan waktu sekitar 2 bulan dan direncanakan akan dimulai di bulan ke dua penelitian ini.
- c. *Analysis*, menghasilkan : Kegiatan yang diprediksi akan memakan waktu kurang lebih 2 bulan ini bertujuan melakukan penjabaran mengenai sistem yang ada termasuk masalah atau peluang yang ada yang direkomendasi untuk di perbaiki/ diatasi, ditingkatkan, atau mengganti sistem yang ada, uraian mengenai sistem pilihan dan sistem perundangan /pertimbangan untuk sistem yang terpilih. Di sini akan dilakukan studi evaluasi terhadap sistem yang sedang berjalan saat ini sehubungan dengan upaya yang telah dilakukan untuk pengambilan keputusan terhadap siapa saja yang berhak dan layak menerima bantuan. Melalui kegiatan analisis ini akan dihasilkan rekomendasi perbaikan demi tercapainya tujuan penelitian.

- d. *Logical Design*, menghasilkan :
Berhubungan dengan fungsi-fungsi, spesifikasi terperinci dari semua element sistem (data, proses, input, output). Pada tahap ini akan dilakukan perancangan terhadap fungsi-fungsi logic dari Sistem Informasi untuk penunjang pengambilan keputusan pemberian bantuan kepada masyarakat desa yang akan dibangun. Perancangan logic ini rencananya akan memakan waktu sekitar 1 bulan.
- e. *Physical design*, menghasilkan :
Pada tahun ke dua penelitian, tahapan ini lebih bersifat teknis, spesifikasi terperinci dari semua element sistem (program, file-file, jaringan, sistem software, dll), rencana untuk teknologi baru. Tahap ini akan memberikan hasil berupa rancangan fisik berupa jenis software yang akan digunakan, tools yang akan digunakan untuk implementasi sistem serta spesifikasi hardware yang dibutuhkan. Sehingga sistem yang diinginkan bisa direalisasikan. Pelaksanaannya diprediksi sekitar 2 bulan.
- f. *Implementation*, menghasilkan :
Code /listing program, dokumentasi, prosedur pelatihan, dan support /dukungan yang dapat diberikan. Tahap ini akan memberikan output berupa sistem yang diinginkan yaitu sebuah system informasi yang mampu membantu dalam pengambilan keputusan pemberian bantuan kepada masyarakat desa, sehingga bisa disalurkan kepada orang yang tepat. Kegiatan atau tahapan ini akan memakan waktu kurang lebih 2 bulan.
- g. *Maintenance*, menghasilkan :
Software versi terbaru atau dengan pembaruan untuk dokumentasi, pelatihan, support /dukungan terhadap hasil penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

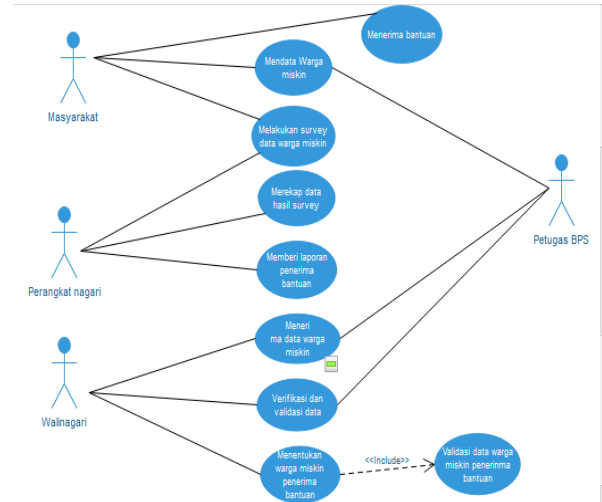
4.1 Aliran Sistem Yang Sedang Berjalan

Perekapan dan pengolahan data dalam pemberian bantuan kepada masyarakat desa meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

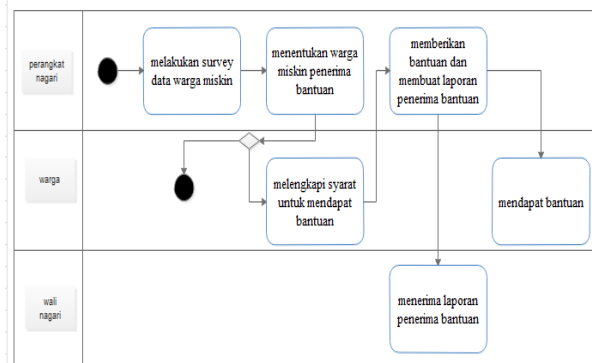
1. Petugas BPS melakukan sensus penduduk setiap 5 tahun sekali. Dimana data penduduk miskin dikelompokkan dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan diserahkan ke perangkat desa untuk dijadikan acuan dalam pemberian bantuan.
2. Hasil dari pendataan tersebut dimusyawarahkan bersama Kepala Desa/ WaliNagari beserta kepala jorong atau ketua RW setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan calon masyarakat yang akan menerima bantuan sesuai dengan kuota bantuan yang tersedia.
3. Perangkat nagari melakukan survey untuk memverifikasi warga masyarakat yang masuk dalam kategori calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yaitu :

masih berstatus sebagai warga dari nagari/desa tersebut, masih hidup, dan kurang mampu.

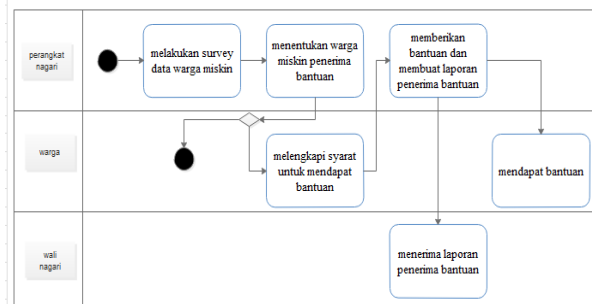
4. Hasil survey dari perangkat nagari tersebut dientrykan ke dalam microsoft excell dan dibuatkan dalam laporan kemudian diserahkan kepada walinagari untuk divalidasi dan ditetapkan sebagai masyarakat miskin penerima bantuan.
5. Walinagari memberikan laporan penerima bantuan kepada pihak kecamatan.



Aliran sistem pemberian bantuan kepada masyarakat desa yang sedang berjalan saat ini dapat dilihat dari Gambar 2 dan 3 berikut :



Gambar 2. Use Case Diagram Lama



Gambar 3. Activity Diagram Lama

5.1.2 Kelemahan Sistem

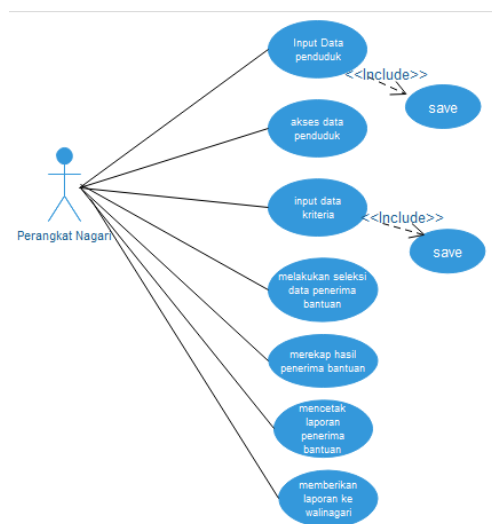
Dari hasil analisa di atas maka dapat kita lihat beberapa kelemahan dari pengolahan sistem data serta pengambilan keputusannya, antara lain sebagai berikut:

1. Penginputan data penduduk masih secara manual dengan menggunakan kertas-kertas dokumen atau buku yang mengakibatkan sulitnya mencari data penduduk yang layak menerima bantuan. Sehingga penerima bantuan seringkali tidak tepat sasaran.
2. Proses pembuatan laporan sudah menggunakan komputer tetapi masih sebatas microsoft excel dan microsoft word saja sehingga harus menginputkan data yang sama berulang-ulang atau jika terjadi suatu kesalahan maka semua data harus diperbaiki secara keseluruhan.

5.2 Perancangan Sistem Secara Umum

5.2.1 Use Case Diagram Sistem Informasi yang diusulkan

Pada gambar 4 berikut dapat dilihat use case diagram baru untuk system informasi yang diusulkan, yang diharapkan bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem yang lama.



Gambar 4. Use Case Diagram Baru

Penjelasan Use Case Diagram baru di atas :

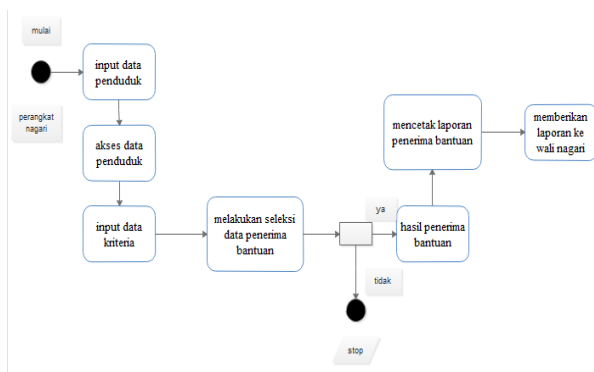
1. Perangkat nagari menginputkan data penduduk yang didapat dari Basis Data Terpadu (BDT), disimpan di database untuk memudahkan mengakses data penduduk yang akan menerima bantuan.
2. Perangkat nagari menginputkan data kriteria penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana kriteria ini dapat dirubah dan disesuaikan nantinya jika ada perubahan kriteria.
3. Untuk menetapkan masyarakat penerima bantuan, diseleksi menggunakan sistem yang telah dibuat. Hasil seleksi tersebut disimpan di database yang

dapat digunakan untuk mempermudah pembuatan laporan penerima bantuan.

4. Laporan penerima bantuan tersebut dibuat rangkap 2 untuk diberikan kepada walinagari dan dilaporkan ke kecamatan. Laporan tersebut berupa laporan KK miskin dan laporan penerima bantuan.

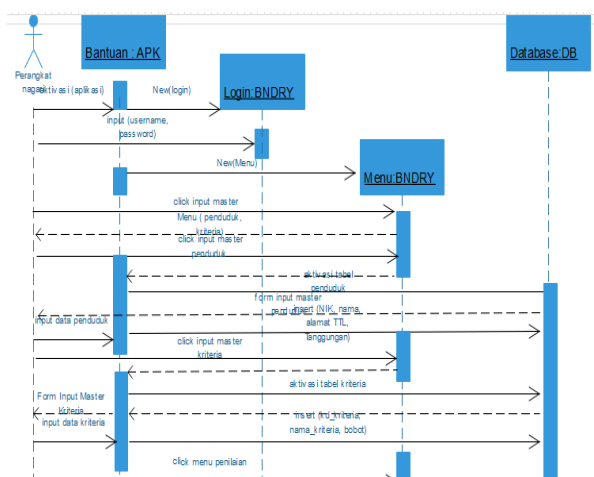
5.2.2 Activity Diagram baru

Activity diagram merupakan alat pemodelan grafis yang dapat digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan actor terhadap sistem, maupun sistem itu sendiri, dan juga menggambarkan cara kerja modul program aplikasi yang dirancang. Activity diagram sistem informasi yang diusulkan dapat dilihat pada Gambar 5 berikut :



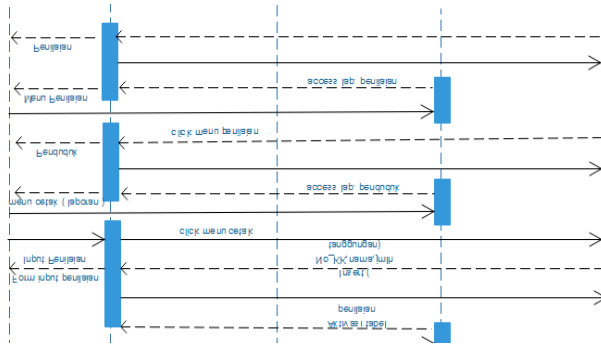
Gambar 5. Activity Diagram baru

5.2.3 Sequence Diagram



Sequence diagram merupakan sebuah diagram yang akan menggambarkan interaksi sebuah objek didalam dan disekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa *message* yang digambarkan terhadap waktu. Digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai respons dari sebuah event yang menghasilkan *output* tertentu. Dalam *sequence diagram* *message*/aktivitas actor akan digambarkan dengan sebuah garis berpanah dari satu objek ke objek lainnya. Sequence diagram untuk sistem

yang akan diusulkan dapat dilihat pada Gambar 6 2. Form Detail Anggota Keluarga berikut ini :



Gambar 6. Sequence Diagram Sistem Informasi

Form Data Pelajar

Mata Pelajaran

Materi Pelajaran

Tugas Pelajaran

Tugas Lembar

Kuis

Aksi

Penilaian

Pembelajaran

Penyusunan

Nilai

Tipe

Status Pelajar

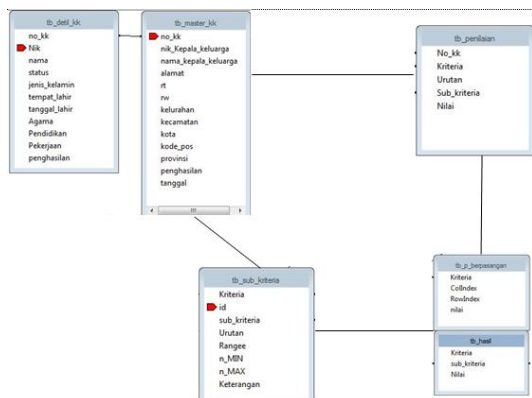
No	Rumus ID	RUK	Nama Lembar	Status Pelajaran	Nilai
1	13105120211133006	PADANG	KEPALAKELUARGA	LAKUKA	
2	13105120211133000	PADANG	ISTIR	PEREM	
3	13105120211133007	PADANG	ANAK	LAKUKA	

Tambah Hapus Reset Cancel

Gambar 9. Form Detail Anggota Keluarga

5.2.4 Class Diagram Sistem Informasi Baru

Rancangan class diagram didasarkan pada obyek-obyek yang ditemukan di lingkungan sistem. Setiap Class yang dihasilkan dalam rancangan adalah merupakan cikal bakal dari sebuah tabel atau file data yang diciptakan untuk menunjang program aplikasi yang dibangun. Class Diagram untuk sistem informasi pemberian bantuan dapat dilihat pada Gambar 7 berikut



Gambar 7. Class Diagram Sistem Informasi Baru

5.3 Desain Input

Desain input merupakan format tampilan yang digunakan sebagai media untuk menginputkan data ke dalam database. Tujuannya agar pengguna sistem bisa memahami dan mengerti sistem secara keseluruhan dan sebagai penunjang pembuatan laporan-laporan. Adapun desain inputnya dapat dilihat pada gambar berikut :

1. Form Detail Kepala Keluarga

New observation

Close

Name

id

sex

name

name (English)

name (Arabic)

age

Date of birth

Date of observation

name (Arabic) / ID

Photo

Variable ID	Name (English)	Name (Arabic)	Answer	ID	Photo
ID000201010000	name	name	name	2	2

OK Cancel

Gambar 8. Form Detail Kepala Keluarga

3. Form Kriteria

Nmap Scan Information

Close

Name:

IP:

Hostname:

Port:

OS:

Scan type:

Hostname	IP	OS	Scan type
192.168.1.1	192.168.1.1	Linux	Nmap Scan

Close Details Help Cancel

Gambar 10. Form Kriteria

4. Form Sub kriteria

The screenshot shows the 'Entry Sub Kriteria' application window. The form on the left contains the following data:

- Nama:** (empty text box)
- Sub Kriteria:** (empty text box)
- Uraian:** (empty text box)
- Range:** (dropdown menu showing '1' to '10')
- MIN:** (empty text box)
- MAX:** (empty text box)
- Keterangan:** (empty text box)

The table on the right displays the following data:

Kriteria	Sub	Uraian	Min	Max
KETERANGAN	SUDAH MENINGGAL	1	0	
KETERANGAN	SEDUP	2	0	
PENGHASILAN	SEDIKIT	1	0	1
PENGHASILAN	SEDANG	2	100000	2
PENGHASILAN	BANYAK	3	200000	
TANGGULANGAN	BANYAK	1	7	
TANGGULANGAN	SEDANG	2	4	
TANGGULANGAN	SEDIKIT	3	0	

Gambar 11. Form Sub Kriteria

5. Form Setting Criteria

Matris Keterbandingan Berpasangan						Hasil			
Kriteria	Keterangan	Penghasilan	Tanggungan			Kriteria	Jumlah Baris	P. Vektor	Hasil
Keterangan	1	2	3			Keterangan			
Penghasilan	0,5	1	2			Penghasilan			
Tanggungan	0,3333333333333333	0,5	1			Tanggungan			
Jumlah						Jumlah			

Priority Vektor						Nilai Hasil			
Kriteria	Keterangan	Penghasilan	Tanggungan	Jumlah Baris	Priority V				
Keterangan									
Penghasilan									
Tanggungan									
Jumlah									

Gambar 12. Form Setting Kriteria

7. Form Penilaian Kelayakan Penerima Bantuan

No KK	Kriteria	Nilai	Sub Kriteria
1	Keterangan	19480521	HIDUP
1	Penghasilan	90054107	SEDANG
1	Tanggungan	76816743	SEDIKIT

Gambar 13. Form Penilaian Kelayakan Penerima Bantuan

5. Kesimpulan

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap permasalahan mengenai perekapan dan pengolahan data dalam penentuan kelayakan penerima bantuan, dan dilandasi dengan teori-teori serta didukung oleh sarana yang dibutuhkan dalam penelitian serta solusi yang dibutuhkan dari permasalahan tersebut. Maka dari itu penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Sistem Informasi ini dibuat dengan memperhatikan sistem yang sedang berjalan dan dikembangkan agar lebih mudah, cepat dan akurat dalam perekapan dan pengolahan data masyarakat penerima bantuan.
2. Sistem Informasi ini terdiri dari 2 aturan pemakaian, yaitu sistem informai untuk perekapan dan pengolahan data penduduk serta penerapan sistem penunjang keputusan untuk penilaian kelayakan penerima bantuan.
3. Sistem informasi yang dibangun membantu meminimalisir adanya Peserta data ganda, Data identitas yang tidak lengkap seperti tempat dan

tanggal lahir, NIK, dan lainnya, serta perubahan data yang diakibatkan perpindahan atau meninggal dunia yang tidak terpantau. Sehingga data penduduk di masing-masing desa *up date* dan akurat.

5.2 Saran

Setelah dilakukan pembuatan sistem yang baru yang merupakan pengembangan dari sistem yang lama, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam upaya peningkatan pemberian bantuan kepada masyarakat desa. Adapun saran-saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Sistem Informasi ini masih terbatas pada pemberian bantuan dan penilaian kelayakan penerima bantuan perorangan. Sehingga kedepannya bisa dikembangkan untuk penilaian kelayakan penerima bantuan berdasarkan keseluruhan anggota keluarga
2. Sistem informasi pemberian bantuan ini masih menggunakan komputer Stand Alone, untuk pengembangan selanjutnya bisa dikembangkan dengan berbasis Web dan Teknologi Multimedia.

6. Daftar Rujukan

- [1] Rahmayanti, D., & Afrinando, R. (2013). Perancangan Sistem Informasi Pada Bagian Gudang PT . PN VI Unit Usaha Ophir. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 12(2), 420–426.
- [2] Hamdani, A. U., & Arof, M. (2015). Pemodelan Sistem Informasi Administrasi Pendistribusian Kartu Asuransi Akda Extra Studi Kasus : PT . Asuransi Bhakti Bhayangkara Jakarta. *Proceeding Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi (SENTIKA)*, 2015(Sentika).
- [3] Sudarsono, N., Kom, M., Nuraen, T., Kom, S., Rahmawati, S., & Kom, S. (2016). Sistem Penunjang Keputusan Pemberian Bantuan Siswa Miskin Di SD Negeri Sukamenak Kota Tasikmalaya Menggunakan Metode Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS). *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia 2016*, 6–7.
- [4] Supriatin, W, B. S., & Luthfi, E. T. (2014). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima BLSM Di Kabupaten Indramayu. *Citec Journal*, 4, 282–295.